

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN
LUWU UTARA - PROVINSI SUL - SEL**
Revoldai Agusta
Dosen STIE-LPI Makassar
Revoldayaugusta@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian ini Tingkat Kemandirian, ditinjau dari aspek kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan mengalami peningkatan terhadap rata-rata kinerja keuangan, tingkat Efektivitas ditinjau dari aspek efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan mengalami peningkatan yang signifikan terhadap rata-rata kinerja keuangan, tingkat Efisiensi ditinjau dari aspek efisiensi keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan mengalami penurunan yang signifikan terhadap rata-rata kinerja keuangan, tingkat Keserasian Belanja Daerah dan PAD ditinjau dari aspek keserasian belanja Daerah dan PAD pemerintah Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan mengalami penurunan yang signifikan terhadap rata-rata kinerja keuangan.

Kata Kunci : Kinerja keuangan, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat : menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. (Mardiasmo, 2002)

Sebaliknya, meskipun potensi suatu daerah kurang, tetapi dengan strategi yang tepat untuk memanfaatkan bantuan dari pusat dalam memberdayakan daerahnya, maka akan semakin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 156 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itulah, perlu kecakapan yang tinggi bagi pimpinan daerah agar pengelolaan dan terutama alokasi dari keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah.

Sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah mengalami perubahan sejak pemerintah menerapkan PP No. 41 Tahun 2006 dan Permendagri No. 13 tahun 2006, sebagai pengganti PP No. 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Untuk mencapai tingkat akurasi yang tinggi tersebut maka Anggaran yang ada harus sesuai dengan perencanaan dan pengelolaannya, untuk itulah maka setiap instansi Pemerintah Daerah Luwu Utara bertugas untuk mengelola anggarannya dalam rangka mewujudkan penggunaan APBD secara efektif dan efisien sehingga nantinya tercipta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan jajaran PEMDA di bawahnya selaku pengguna APBD berusaha untuk membuat perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara ? ”

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pikir di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah : Diduga bahwa kurangnya pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Utara.”

TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan daerhnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007: 231).

Berkaitan dengan hal itu, analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah kabupaten berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002: 169).

Penelitian Terdahulu terkait Penelitian

Menurut Suwignyo (2012 : 74) kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian antara kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, dan kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan

Pramono (2012 : 67) Mengungkapkan Bawa Pendapatan Asli daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Di ukur dari Kinerja keuangan dalam suatu daerah.

Andi Abdullah (2015 : 55) indikator kinerja keuangan daerah secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Keserasian Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 (dalam Erlina dkk ,2008) adalah “ semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian Indeks Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik, sedangkan menurut rumusan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1. Salah satu ciri ilmu kesejahteraan sosial adalah upaya pengembangan metodologi untuk menangani berbagai macam masalah sosial, baik tingkat individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat (Adi, 1994: 3-5).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis uji beda dua rata-rata untuk mengetahui perkembangan variabel yang dianalisis.

Uji beda dua rata-rata merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel memiliki nilai yang sama atau tidak sama, lebih tinggi atau tidak lebih tinggi, lebih rendah atau tidak lebih rendah dan sebagainya. Jika analisis data dalam sebuah penelitian dilakukan dengan cara membandingkan data antar-waktu dari satu kelompok sampel, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan *uji-t* sebagai berikut : Langkah-langkah pengujian hipotesis :

a. Menyusun H1 dan H2

$$H1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

$$H2 : \mu_1 \neq \mu_2$$

- μ merupakan rerata data kinerja keuangan
- y merupakan rerata data kesejahteraan masyarakat

b. Menghitung statistik yaitu :

$$Md$$

$$\sqrt{\frac{\sum Xd^2}{n(n-1)}} \text{ dengan :}$$

di = selisih skor dari setiap subjek (i)
Md = rerata dari gain (d)

Xd = deviasi skor gain terhadap reratanya ($Xd = di - Md$)

Xd^2 = kuadrat deviasi skor gain terhadap reratanya

n = banyaknya subjek penelitian

c. Menentukan *level of significance* (aa)

Untuk pengujian hipotesis, selanjutnya nilai *t* hitung di atas dibandingkan dengan nilai dari tabel distribusi *t* (*t tabel*). Cara penentuan nilai *t* tabel didasarkan pada taraf signifikansi (misal $\alpha = 0,05$) dan $dk = n - 1$.

d. Kriteria pengujian hipotesis

H_0 ditolak apabila t hitung $< t$ tabel, atau H_0 diterima apabila t hitung $> t$ tabel

e. Buat kesimpulan dengan membandingkan antara nilai *t* hitung dengan kriteria hitungnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja keuangan

Tingkat kemandirian

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah atau yang sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal.

PAD memegang peranan yang sangat penting, oleh karena itu PAD diharapkan dapat menjadi bagian terbesar dari seluruh penerimaan daerah dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah kabupaten, karena faktor penting dalam kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari PAD, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi dapat dikurangi.

Analisis tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten yang bisa memperlihatkan tingkat kemandirian pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan otonomi daerah dan menilai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan kinerja keuangannya sesuai dengan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara semakin meningkat, tetapi perbedaan peningkatan tersebut tidak bermakna terhadap perbedaan kinerja keuangan. Peningkatan kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten telah berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan

asli daerah yang dimiliki dibandingkan pada periode sebelumnya, terbukti dari laporan perhitungan APBD Kabupaten Luwu Utara, rata-rata pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan seperti pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pembagian laba lembaga keuangan bank yang ada, sumbangan pihak ketiga (investor yang menanamkan modalnya) atau yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pola hubungan antara pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat digolongkan menjadi pola hubungan yang instruktif, hal ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Utara hanya menjalankan amanat dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi sehingga belum mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Tetapi dengan adanya upaya pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah, maka akan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi dan mampu menjalankan fungsi otonomi daerah dengan baik.

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa PAD berperan penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini sependapat dengan Dwirandra (2008), dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah. PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator untuk mengurangi ketergantungan pemerintah kabupaten kepada pusat yang pada prinsipnya semakin besar PAD dalam APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan provinsi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dacosta (2002) yang meneliti tingkat kemandirian Kota Kupang, menyatakan bahwa secara rata-rata derajat otonomi fiskal Kota Kupang selama tahun 1997 - 2001 dikategorikan sangat kurang karena berada di bawah 25%.

Tingkat Efektivitas

Tingkat efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan pemerintah kabupaten dan merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak bermakna terhadap kinerja keuangan. Dengan peningkatan efektivitas, maka hal ini berarti bahwa, pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah berhasil merealisasikan pendapatan asli daerah dan pendapatan non asli daerah seperti dana perimbangan pemerintah pusat dan provinsi melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bantuan keuangan lainnya. Realisasi pendapatan tersebut melebihi jumlah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah kabupaten untuk memperoleh pendapatan.

Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa efektivitas realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Luwu Utara hanya berlaku terhadap realisasi pendapatan non pendapatan asli daerah. Dari laporan perhitungan APBD, jumlah realisasi pendapatan asli daerah jauh lebih sedikit atau tidak proporsional dibanding dengan jumlah pendapatan non PAD yang terealisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Utara lebih cenderung mengharapkan pendanaan dari pihak luar dibanding memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli yang ada di Kabupaten Luwu Utara sendiri. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Samson (2001) yang meneliti tentang indikator-indikator keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Barito Kuala, menyatakan bahwa secara rata-rata pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama tahun 1995 - 2000 dikategorikan sangat efektif dengan rasio efektivitas 104%. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwirandra (2008) yang menyatakan bahwa daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Bali pada periode 2002 - 2006 masuk dalam kategori keuangan yang cukup efektif, efektif dan sangat efektif serta tidak ada yang kurang dan tidak efektif atau dengan rasio efektivitas keuangan berkisar dari 75,01% sampai dengan di atas 100%.

Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi dimaksudkan untuk menilai pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara sudah efisien, Penurunan tingkat efisiensi keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara terjadi karena realisasi anggaran belanja pemerintah Kabupaten Luwu Utara meningkat signifikan terhadap total anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, dengan kata lain, pemerintah kabupaten Luwu Utara cenderung menggunakan seluruh anggaran belanja yang ada.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara masih sangat kurang dan terkesan adanya pemberoran dengan tidak mengindahkan azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah. Selain itu pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga memiliki kecenderungan selalu ingin menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD.

Tingkat Keserasian Belanja Daerah dan PAD

Tingkat keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah Kabupaten Luwu Utara memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pelayanan publik secara optimal sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keserasian belanja pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengalami penurunan, tetapi penurunan tersebut tidak bermakna terhadap perbedaan kinerja keuangan kabupaten Luwu Utara. Penurunan tingkat keserasian belanja pemerintah Kabupaten Luwu Utara disebabkan oleh tingginya realisasi belanja daerah secara keseluruhan seperti belanja aparatur daerah, belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan yang jumlahnya tidak signifikan dan jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memang sejak awal telah memiliki komitmen yang tinggi untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbukti dengan semakin meningkatnya alokasi dana melalui APBD untuk belanja pelayanan publik. Tetapi realita yang terjadi adalah peningkatan alokasi dana belanja pelayanan publik tidak signifikan dengan alokasi dana pada pos-pos belanja langsung, yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi

Pendapatan perkapita masyarakat merupakan perolehan pendapatan domestik regional bruto dibagi dengan total penduduk di Kabupaten Luwu Utara. Apabila dihitung secara rata-rata tingkat pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp.2.570.198. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Luwu Utara semakin meningkat di. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, dan dapat disimpulkan bahwa peningkatan tersebut bermakna terhadap perbedaan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Luwu Utara jelas dipengaruhi oleh pendapatan domestik regional bruto yang berasal dari sektor-sektor perekonomian produktif yang ada, seperti kegiatan perdagangan dan jual beli barang, usaha pertanian misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, berternak dan budi daya hasil laut yang dapat mendatangkan penghasilan bagi masyarakat. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Luwu Utara juga menjelaskan bahwa setiap masyarakat dapat memiliki akses terhadap sumber-sumber daya ekonomi berupa pemerataan pendapatan dan tingkat daya beli dan adanya partisipasi masyarakat di dalam kegiatan ekonomi produktif sehingga masyarakat bisa memperoleh penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Yamin (2000) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Irian Jaya, yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang relatif besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat diukur dari jumlah penduduk yang menamatkan bangku pendidikan formal. Dengan kata lain tingkat pendidikan memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Utara yang dapat mengenyam dunia pendidikan sehingga dampaknya adalah mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa jumlah masyarakat yang telah mengenyam dunia pendidikan semakin meningkat, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini berarti jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan di bangku sekolah semakin meningkat.

Indeks Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan

Kesejahteraan masyarakat diukur dari tingkat kemampuan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain kesejahteraan memberikan gambaran mengenai kemampuan penduduk di Kabupaten Luwu Utara yang dapat memenuhi

kebutuhan hidup sehingga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki kesejahteraan meningkat pada, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini berarti jumlah masyarakat yang memiliki penghasilan diatas rata – rata semakin meningkat dapat pula dikatakan bahwa dengan penghasilan dan kesejahteraan Masyarakat Luwu Utara, penyerapan Tenaga Kerja juga merata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil penelitian terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan tingkat kemandirian, tingkat efektivitas, tingkat efisiensi dan tingkat keserasian belanja daerah dan PAD dapat disimpulkan sebagai Tingkat Kemandirian, ditinjau dari aspek kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan mengalami peningkatan terhadap rata-rata kinerja keuangan, tingkat Efektivitas ditinjau dari aspek efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan mengalami peningkatan yang signifikan terhadap rata-rata kinerja keuangan, tingkat Efisiensi ditinjau dari aspek efisiensi keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan mengalami penurunan yang signifikan terhadap rata-rata kinerja keuangan, tingkat Keserasian Belanja Daerah dan PAD ditinjau dari aspek keserasian belanja Daerah dan PAD pemerintah Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan mengalami penurunan yang signifikan terhadap rata-rata kinerja keuangan.
2. Hasil penelitian terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan indeks kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi, indeks pendidikan serta Indeks kesejahteraan dan ketenagakerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut :Indeks Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi dilihat dari Indeks kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan bahwa rata-rata kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan signifikan terhadap rata-rata kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, indeks Pendidikan dilihat dari indeks pendidikan masyarakat Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan bahwa rata-rata kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan terhadap rata-rata kesejahteraan masyarakat, Indeks Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan dilihat dari Indeks kesejahteraan dan ketenagakerjaan masyarakat Kabupaten Luwu Utara, disimpulkan bahwa rata-rata kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan terhadap rata-rata kesejahteraan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disampaikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara diharapkan untuk lebih memperhatikan, mengakomodir, memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber PAD yang dimiliki daerah ketika menyusun anggaran pendapatan seperti pemanfaatan sumber-sumber retribusi, pengembangan potensi-potensi alam di sektor pertambangan dan pertanian sehingga mampu mendorong pencapaian realisasi pendapatan asli daerah yang optimal dan meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi.
2. Diharapkan agar penyusunan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada periode-periode mendatang, pemerintah Kabupaten Luwu Utara lebih memperhatikan rasio-rasio keuangan daerah yang umum digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari dan Setiaji, Wirawan. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi X.
- Budiarto, Bambang. 2007. Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Devas Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly. 1999, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Terjemahan Masri Maris) UI - Press, Jakarta.
- Diana, Heny F. 2008. Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 14 No. 8 Hal. 193 -229
- Halim, Abdul. 2002. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan

- YKPN. Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hamzah, Ardi, 2007. analisa kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan : pendekatan analisis jalur (studi pada 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Timur. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Hamzah, Muhammad Zilal. 2005. Does Block Grant Generates Economic Growth on Province-Level in Indonesia After The Implementation of Fiscal Decentralization Policy? *Simposium Riset Ekonomi II*. Surabaya.
- Hidayat, Paidi, Pratomo, Ario W. dan Harjito, Agus D. 2007, Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara Dengan Menggunakan Indikator Efektifitas, Efisiensi, Perkembangan APBD dan Kemampuan Keuangan Daerah, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 12 No. 3 Hal. 213 -222.
- Hirawan, Susiati B, 1990, "Keleluasaan daerah atau kontrol pusat?", dalam Arsyad Anwar dan Iwan Jaya Azis (Editor), *Bunga Rampai Ekonomi*, FE UI, Jakarta.
- Kaho, Yosef Riwu, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Kunarjo, Bambang. 1996. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- <http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-pertumbuhan-ekonomi-menurut.html>
- http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/450/jbptunikompp-gdl-anggimelia-22500-5-unikom_a-i.pdf
- http://fatih-io.biz/definisi_dan_pengertian_pengaruh_menujurut_para_ahli.html
- <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=151128&val=986&title=PENGARUH%20KINERJA%20KEUANGAN%20DAERAH%20PADA%20%20PERTUMBUHAN%20EKONOMI,%20PENGANGGURAN,%20DAN%20KEMISKINAN%20KABUPATEN%20DAN%20KOTA>
- <http://core.ac.uk/download/pdf/11734532.pdf>
- http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-1267-1228220008-tesis%20j%20k%20arsa.pdf
- <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjACOApqFQoTCKWS0fyP->
- <http://ariplie.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efisiensi-apa-itu-efisiensi.html>
- <http://arsip.uji.ac.id/files/2012/08/05.2-bab-233.pdf>
- <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-iiphimawan-22764-7-babii.pdf>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38498/4/Chapter%20II.pdf>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30967/3/Chapter%20II.pdf>